

Kajian Belanja Modal pada Pemerintah Kota Jambi: Peran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan

Siswoyo¹, Trie Hierdawati², Bima Rahmat Dani Pratama³

¹Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

²Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

³Universitas Muhammadiyah Jambi, Jambi, Indonesia

Email Korespondensi: ¹siswoyosis91@gmail.com

Abstract

Capital expenditure is an important component that can influence the financial performance of local governments. A higher allocation of capital expenditure can encourage the development of regional infrastructure such as roads, bridges, buildings, and other public facilities, which in turn improves the quality of public services provided to the community. Therefore, capital expenditure plays a significant role in supporting regional development and improving public welfare. This study aims to analyze the factors that influence capital expenditure in the Government of Jambi City by using two independent variables, namely Local Own-Source Revenue (PAD) and Intergovernmental Transfers (Balancing Funds). The research method used is a descriptive quantitative approach utilizing secondary data for the period 2010–2023. To address the research problem, the study applies multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that Local Own-Source Revenue and Balancing Funds have a significant influence on the capital expenditure of the Jambi City Government.

Keywords: Local Own-Source Revenue (PAD), Capital Expenditure, Balancing Funds, Regional Finance.

Abstrak

Belanja modal merupakan salah satu komponen penting yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Alokasi belanja modal yang lebih besar mampu mendorong pembangunan infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, gedung, serta berbagai fasilitas publik lainnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, belanja modal menjadi indikator penting dalam mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi belanja modal pada Pemerintah Kota Jambi dengan menggunakan dua variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif dengan memanfaatkan data sekunder yang diperoleh selama periode 2010 hingga 2023. Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal Pemerintah Kota Jambi.

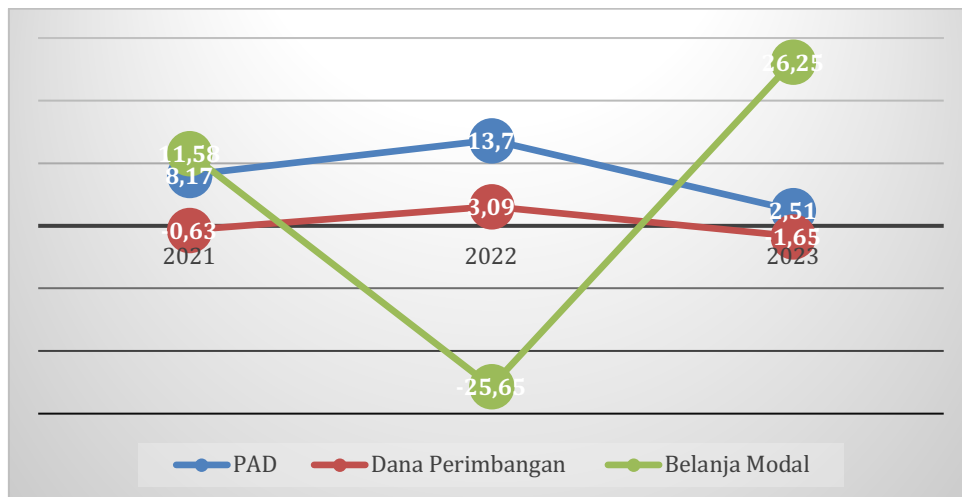
Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dana Perimbangan, Keuangan Daerah,

PENDAHULUAN

Belanja Modal menjadi faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan Pemerintah Daerah. Belanja modal yang besar dapat meningkatkan pembangunan infrastruktur setiap daerah sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ketimpangan fiskal Pemerintah pusat mengalokasikan dana untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan amanat undang-

- undang dengan harapan pemerintah daerah dapat mengelola dengan baik sehingga dapat meningkatkan PAD [1].

Pelaksanaan dan perwujudan desentralisasi fiskal tersebut adalah dana perimbangan dalam hal ini adalah dana transfer yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) [2]. Provinsi Jambi yang memiliki sumber ekonomi yang besar diharapkan mampu untuk berinovasi dalam menggali potensi untuk memperbesar peluang menghasilkan pendapatan asli daerah sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai belanja daerah. Berikut data Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kota Jambi tahun 2021-2023.



Gambar 1.1. Perkembangan PAD, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Kota Jambi.

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pembiayaan bagi pemerintahan daerah dalam menciptakan infrastruktur daerah. PAD didapatkan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. PAD ini digunakan oleh pemerintah daerah salah satunya untuk pembiayaan atas belanja daerah, maka pemerintah daerah dituntut untuk bisa mengembangkan dan meningkatkan PAD dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki agar dapat membiayai segala kegiatan penciptaan infrastruktur atau sarana prasarana daerah. berdasarkan pernyataan diatas maka dapat disimpulkan bahwa adanya pengaruh PAD terhadap belanja modal suatu daerah.

Dana perimbangan merupakan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat yang bersumber dari APBN [3]. Alokasi dana perimbangan bertujuan untuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah yang memiliki kemampuan keuangan lemah akan mengandalkan dana perimbangan untuk membiayai segala kegiatan pemerintahan, karena dana perimbangan merupakan sumber pendanaan bagi daerah dalam pelaksanaan pembangunan.

Beberapa peneliti terdahulu yang meneliti terkait pendapatan asli daerah dan dana perimbangan dan pengaruhnya terhadap belanja modal diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1. Penelitian Terdahulu

Nama	Hasil penelitian
Gamela, M. I., Hartono, A., & Ulfah, I. F. (2024)	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap belanja modal
Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. (2023).	Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Belanja Modal. Sedangkan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal
Meiriana, A. Z., Kusumaningtyas, S. A., & Pangestuti, A. L. (2024).	Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) serta Dana Perimbangan (DP) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja daerah.
Damayanti, F., Prihanto, P. H., & Artis, D. (2024).	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y)

Berdasarkan pada tabel 1.1. diatas, terdapat beberapa peneliti yang telah melakukan penelitian terkait belanja modal. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi dari pemerintah pusat menjadi variabel yang dapat mempengaruhi belanja modal suatu daerah. Terdapat perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh dari variabel independen terhadap belanja modal. Meiriana et, al. [4] dan Damayanti et, al. [5] menyatakan bahwa terdapat pengaruh signifikan dari pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana perimbangan dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Sedangkan Gamela, et al., [6] dan Zulkarnain, Z. I., & Haryati, T. [7] menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh dari variabel pendapatan asli daerah,

dana alokasi umum, dana perimbangan dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal. Perdebatan akademis tersebut memberikan ruang kepada peneliti untuk menguji kembali terkait teori ataupun hasil penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi belanja Modal pemerintah.

LANDASAN TEORI

Teori Desentralisasi Fiskal

Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya secara mandiri [8]. Desentralisasi fiskal bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendorong kemandirian daerah. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur pendapatan dan belanja daerah guna mendukung pembangunan ekonomi.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di Indonesia diwujudkan melalui pemberian kewenangan pengelolaan keuangan daerah, termasuk penggalan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan.

Teori Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan seluruh hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang [9]. Keuangan daerah mencakup aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang baik akan mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan. Salah satu indikator penting dalam keuangan daerah adalah kemampuan daerah dalam membiayai pengeluaran melalui sumber pendapatan sendiri.

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan yang diperoleh daerah dari potensi ekonomi yang dimilikinya [10]. PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain PAD yang sah. PAD mencerminkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin tinggi PAD, maka semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan tanpa bergantung pada pemerintah pusat. PAD juga

- berperan penting dalam meningkatkan alokasi belanja daerah, khususnya belanja modal.

Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [11]. Dana perimbangan terdiri dari:

- Dana Alokasi Umum (DAU)
- Dana Alokasi Khusus (DAK)
- Dana Bagi Hasil (DBH)

Tujuan utama dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah serta memastikan pemerataan pembangunan. Bagi daerah dengan kemampuan keuangan rendah, dana ini menjadi sumber utama pembiayaan pembangunan.

Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang digunakan untuk memperoleh aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi [12]. Contohnya meliputi pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan fasilitas publik lainnya. Belanja modal memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin besar alokasi belanja modal, maka semakin besar pula potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

METODOLOGI

Pada penelitian ini, metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, dimana metode deskriptif kuantitatif merupakan metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah ditetapkan sebagaimana adanya [13]. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu [14]. Sumber data penelitian ini dilakukan dengan mengambil data yang diperoleh dari situs terkait antara lain yaitu Data Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui websitenya

- yaitu www.djpk.kemenkeu.go.id selanjutnya untuk data belanja modal pemerintah kota jambi data diambil dari situs Badan Pusat Statistik kota Jambi dengan periode pengumpulan data yaitu selama 12 tahun dimulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan asli daerah (PAD) dan dana Perimbangan terhadap belanja modal pemerintah kota Jambi tahun 2012 – 2023 maka dibuatkan dengan rumus persamaannya yaitu (Sugiyono, 2020)

HASIL

Guna menjawab rumusan masalah yang kedua dalam penelitian ini maka digunakanlah alat analisis berupa regresi linier berganda dimana Variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) dan Belanja Modal (Y) dengan time series yakni dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2023. Berdasarkan hasil regresi dengan menggunakan program SPSS, diperoleh hasil regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 2.1. Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-25218	116108		-0,217	0,833
1 PAD	0,55	0,203	0,631	2,713	0,024
Dana Perimbangan	0,217	0,159	0,316	1,359	0,207

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 2.1 diatas dapat diketahui model persamaan regresi yang terbentuk. Adapun persamaan regresi linier yang terbentuk dari hasil perhitungannya yaitu : $Y = -25217,63 + 0,550 X_1 + 0,217 X_2 + e$.

Berdasarkan pada model persamaan tersebut diperoleh konstanta (α) sebesar -25217,63 yang menunjukkan bahwa jika semua variabel independent (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) dianggap tidak terjadi perubahan

atau tetap maka nilai variabel dependent Belanja Modal (Y) mengalami penurunan sebesar 25217,63. Kemudian diperoleh koefisien variabel pendapatan asli daerah (X1) sebesar 0,550. Nilai koefisien variabel pendapatan asli daerah bertanda positif terhadap belanja Modal dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,550. Hal ini menunjukkan bahwa setiap nilai variabel pendapatan asli daerah dinaikkan sebesar 1 point atau satuan sementara, maka variabel Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 0,550 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Jambi periode 2012 sampai dengan 2023. Berdasarkan pada hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa secara parsial atau individu Pendapatan Asli Daerah (X1) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pemerintah daerah Kota Jambi diterima.

Pada tabel 5.5 diatas juga dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yaitu Dana Perimbangan (X2) diperoleh nilai koefisien sebesar 0,217. Nilai koefisien dana perimbangan bertanda positif terhadap Belanja Modal (Y) dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,217. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan nilai variabel dana perimbangan sebesar 1 point atau satuan sementara, maka variabel Belanja Modal (Y) akan meningkat sebesar 0,217. Berdasarkan pada hasil perhitungan tabel 5.5 diatas juga dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan Berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal Kota Jambi dengan tingkat signifikansinya yaitu sebesar 0,207. Berdasarkan pada hasil penelitian ini menunjukan bahwa hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa secara parsial atau individu Dana Perimbangan (X2) berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal Pemerintah daerah Kota Jambi diterima. Hasil Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Susilo [15] dan menolak hasil penelitian yang dilakukan oleh Evrina [16] yang menyatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal Kabupaten Bengkalis periode 2017 – 2021.

Untuk menguji ada atau tidaknya pengaruh secara bersama-sama atau simultan antara variabel bebas (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) terhadap variabel terikat (Belanja Modal) maka dilakukan pengujian terhadap hipotesis berupa uji F. Adapun nilai hasil Uji F dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	96648664097	2	48324332048	19,4	,001 ^b
Residual	22420062449	9	2491118050		
Total	1,19069E+11	11			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), Dana Perimbangan, PAD

Berdasarkan pada tabel 3.1. diatas maka dapat disimpulkan bahwa nilai uji F statistik signifikansi sebesar 0,001 yang berarti kurang dari 0,05, Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal (Y). Berdasarkan pada Hasil Penelitian ini pula dapat dijelaskan bahwa hipotesis terhadap pengaruh Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal (Y) Kota Jambi dengan tingkat signifikansinya sebesar 0,001. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Wulandari, R. [17] yang melakukan penelitian terhadap kinerja keuangan pemerintah Provinsi di Indonesia. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah sangat signifikan mempengaruhi Belanja Modal Provinsi di Indonesia periode 2012 sampai dengan 2018. Selanjutnya untuk melihat seberapa besarnya pengaruh variabel independent (pendapatan asli daerah dan dana perimbangan) terhadap variabel dependent (Belanja Modal) secara keseluruhan maka dapat dilihat pada tabel model summary berikut ini:

Tabel 4.1. Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,901 ^a	0,812	0,77	49911,1

Pada tabel 4.1. di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,812 atau 81,2%. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independent (Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan) mempengaruhi variabel dependen (Belanja Modal) sebesar 81,2%. Sedangkan 18,8% dipengaruhi oleh variabel bebas lainnya yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Berdasarkan pada hasil Rsquare tersebut maka dapat

dikatakan bahwa variabel bebas berupa Pendapatan Asli Daerah (X1) dan Dana Perimbangan (X2) sangat dominan mempengaruhi Belanja Modal (Y) Pemerintah Daerah Kota Jambi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sari, P. R., & Jaeni, J. [18] yang menyatakan bahwa Belanja Modal daerah dipengaruhi oleh Pendapatan Asli daerah dan Dana Perimbangan. Selanjutnya untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat secara parsial maka dilakukan pengujian dengan Uji T. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1. Hasil Uji-t

Coefficients ^a			
	Model	t	Sig.
	(Constant)	-0,217	0,833
1	PAD	2,713	0,024
	Dana Perimbangan	1,359	0,207

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Berdasarkan pada tabel 5.1. nilai uji t dalam menentukan hipotesis apabila nilai T hitung lebih besar dari T tabel maka H_0 ditolak dan H_a diterima dengan besarnya nilai T tabel yaitu 1,987. Berdasarkan pada tabel 4. diatas maka dapat dilihat nilai t hitung untuk X1 yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar $2,713 > 1,987$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,024 dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Sehingga secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja modal (Y) di Kota Jambi. Pada tabel 5.5 juga dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung untuk X2 yaitu Dana Perimbangan sebesar $1,359 < 1,987$ dengan tingkat signifikansi sebesar 0,207 dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak. Sehingga secara parsial Dana Perimbangan mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel Belanja modal (Y) di Kota Jambi.

KESIMPULAN

Bertolak pada hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan berpengaruh secara simultan maupun parsial

terhadap belanja modal pemerintah Kota Jambi periode 2012 sampai dengan 2023. Masih terdapat celah atupun ruang untuk peneliti selanjutnya untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait belanja modal pemerintah.

REFERENSI / DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Herlin, R. Neldawaty, and R. A. Yanda, "Pengaruh Belanja Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Provinsi Jambi," *ILTIZAM J. Syariah Econ. Res.*, vol. 7, no. 2, pp. 225–238, 2023.
- [2] S. U. Ekawarna, "Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah," *J. Perspekt. Pembiayaan dan Pembangunan Drh.*, vol. 4, no. 3, pp. 167–184, 2017.
- [3] R. A. Marshella and R. Dani, "Dampak Pengangguran dan Pembangunan Manusia terhadap Produk Domestik Regional Bruto di Provinsi Jambi," *J. Econ. Bus. Insight*, vol. 1, no. 01, pp. 1–10, 2025.
- [4] A. Z. Meiriana, S. A. Kusumaningtyas, and A. L. Pangestuti, "Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah di Kabupaten Kota Provinsi Jawa Timur 2016–2022," *Kaji. Ekon. dan Akunt. Terap.*, vol. 1, no. 2, pp. 49–67, 2024.
- [5] F. Damayanti, P. H. Prihanto, and D. Artis, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran belanja modal di Provinsi Jambi Tahun 2001-2023," *e-Jurnal Perspekt. Ekon. dan Pembangunan Drh.*, vol. 13, no. 1, pp. 21–30, 2024.
- [6] M. I. Gamela, A. Hartono, and I. F. Ulfah, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan," *Digit. Bisnis*, vol. 3, no. 2, pp. 154–179, 2024.
- [7] Z. I. Zulkarnain and T. Haryati, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah," *J. Ris. Akunt. Aksioma*, vol. 22, no. 1, pp. 27–37, 2023.
- [8] K. Febianti, I. Wiarta, S. Lestari, and A. Marsyaf, "Kajian Empiris Mengenai Dampak Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dan Inflasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi," *J. Econ. Bus. Insight*, vol. 1, no. 01, pp. 33–42, 2025.
- [9] E. Hutagalung, "Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah," *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja*, vol. 42, no. 1, p. 1, 2016.
- [10] B. P. Aji, I. K. Kirya, and G. P. A. J. Susila, "Analisis sumber pendapatan asli daerah (PAD) dalam pelaksanaan otonomi daerah di kabupaten buleleng," *Bisma J. Manaj.*, vol. 4, no. 2, pp. 95–104, 2018.
- [11] I. Ferdiansyah, D. R. Deviyanti, and S. Pattisahusiwa, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana perimbangan terhadap belanja daerah," *Inov. J. Ekon. Keuangan, Dan Manaj.*, vol. 14, no. 1, pp. 44–52, 2018.
- [12] Y. Rizal, "Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Kota Langsa," *J. Samudra Ekon.*, vol. 3, no. 1, pp. 74–83, 2019.
- [13] R. Dani *et al.*, "Desain Penelitian: Teori, Metode, dan Implementasi," *Penerbit Mifandi Mandiri Digit.*, vol. 1, no. 01, 2024.

- [14] T. Hierdawati, S. N. Putri, G. Erwin, and A. Rifqi, "Determining Factors for Culinary MSME Income in Simpang IV Sipin Subdistrict, Jambi City," *J. Econ. Bus. Insight*, vol. 1, no. 01, pp. 43–53, 2025.
- [15] S. Susilo, R. N. H. Putri, F. Y. Simangunsong, and M. Labiba, "Intergovernmental Transfer and Local Own-Source Revenue on Capital Expenditure," *Eqien-Jurnal Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 3, pp. 370–379, 2024.
- [16] N. Ervina, S. Tan, and E. Achmad, "Determinan Penerimaan Pajak Daerah dan Pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi," *J-MAS (Jurnal Manaj. dan Sains)*, vol. 8, no. 2, pp. 1349–1364, 2023.
- [17] A. Dalil, Sukidin, and W. Hartanto, "Pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal pada kabupaten dan kota di provinsi jawa timur tahun 2013-2018," *J. Pendidik. Ekon.*, vol. 14, no. 1, p. 178, 2020.
- [18] I. S. Febriana and S. Praptoyo, "Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada Provinsi Jawa Timur," *J. Ilmu dan Ris. Akunt.*, vol. 4, no. 9, 2015.